

KONTESTASI ORMAS ISLAMIS DI INDONESIA

Zulfadli

Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang

email: zulfadli@soc.unand.ac.id

Abstract: *This article discussed about contestation of Islamist mass groups in Indonesia. In general, Islamists or Islamism refers to an islamic organizations which based their political ideology on Islam. This study finds out what strategies used by the islamist group to attain their political agenda and its implications when they are confronting with other mainstream and islamic group. This research uses qualitative method with a descriptive analysis approach. This research used theoretical framework of Islamic Revivalism, Political Islam, Islamism and Social Movement theory. The result of the discussion shows that islamis contestation of mainstream islamic mass group in Indonesia to dominate arena through political movements: first, by taking benefits from political opportunity, including transformastion underground movement become legal movement; second, through structural mobilization, which consists of internal mobilization and external mobilization; third, using framing proces, by counter all issues and systems form the west, such as democracy, nationalism and human rights; fourth infiltration by controlling mosque, campus, student, takmir community, bureaucracy and government.*

المخلص: تناقش هذه المقالة حول صراع المنظمات الإسلامية في إندونيسيا. على سبيل العام كان الإسلاميون حركات إسلامية تجعل الإسلام أساس إيديولوجيتها السياسية. وهذه المقالة ستبحث الاستراتيجية التي تقوم بها حركة المنظمة الإسلامية لتحقيق أهدافها الاجتماعية والسياسية وكيف أثارها عندما تواجه مجموعة إسلامية أخرى من تيار المنظمة الإسلامية المعتدلة. وهذا البحث من البحث الكيفي الذي يستخدم منهج التحليل الوصفي. والنظريات المستخدمة في هذا البحث هي الصحة الإسلامية، والسياسية الإسلامية،

والنظرية الإسلامية، والحركة الاجتماعية. ونتيجة هذا البحث تدل على أن صراع الحركة الإسلامية السائدة في المجتمع الإندونيسي من خلال استراتيجية الحركة السياسية: أولاً، استفادة الفرصة السياسية أي استفادة الفرصة الإصلاحية لإنهاء الحركة السرية حتى تصبح الحركة القانونية الرسمية وقامت الحركة حرة. ثانياً، من خلال التعبئة الهيكلية التي تتكون من التعبئة الداخلية والتعبئة الخارجية. ثالثاً، تنظيم عملية الحركة أي عن طريق القيام بمعارضة جميع الأفكار والأنظمة من الغرب مثل الديمقراطية والقومية وحقوق الإنسان. رابعاً، أن تدخل هذه الحركة من خلال المساجد والجامعات وطلاب الجامعة ومنظمة المساجد والبيروقراطية والحكومة وما إلى ذلك كآثار من الصراع الإسلامي.

Abstrak: *Tulisan ini membahas tentang kontestasi ormas Islam di Indonesia. Secara umum, Islamis atau Islamisme adalah gerakan Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologi politiknya. Penelitian ini akan menjawab bagaimana strategi yang digunakan gerakan ormas Islam untuk mencapai agenda sosial-politiknya dan bagaimana implikasinya ketika berbenturan kepentingan dengan kelompok ormas-ormas Islam lainnya yang notabene merupakan ormas Islam mainstream atau moderat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Revivalisme Islam, Islam Politik, Islamisme dan teori Gerakan sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kontestasi islamisme ormas Islam mainstream di Indonesia dalam menguasai arena strategis yang terdapat di masyarakat melalui strategi gerakan politik: pertama, memanfaatkan peluang politik, yaitu peluang reformasi untuk mengakhiri gerakan bawah tanah menjadi gerakan legal sehingga dapat bergerak dengan leluasa. Kedua, memobilisasi struktur, yang terdiri dari mobilisasi internal dengan melakukan pengkaderan secara intensif dan mobilisasi eksternal. Ketiga, penyusunan proses gerakan, yakni dengan cara melakukan pergolakan pemikiran dengan menentang segala pemikiran dan sistem dari Barat, seperti demokrasi, nasionalisme dan HAM. Keempat, melakukan perembesan dengan menguasai mesjid, kampus, mahasiswa, komunitas takmir, birokrasi dan pemerintahan dan sebagainya sebagai implikasi dari kontestasi islamisme.*

Keywords: kontestasi, ormas, islamisme, peluang politik, mobilisasi struktur, penyusunan proses gerakan.

PENDAHULUAN

Relasi Islam dan negara dalam lanskap percaturan politik di Indonesia selalu menarik untuk didiskusikan. Kajian tentang Islam dan negara telah banyak memikat para ilmuwan dari dalam dan maupun luar negeri. Beberapa persoalan yang dijadikan bahan kajian terkait hubungan Islam dan negara, agama dan politik, fundamentalisme dan radikalisme Islam, ekspresi politik umat Islam, parpol Islam dan dinamika gerakan politik Ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Sebagai salah negara muslim terbesar dunia bentuk ekspresi dari aspirasi umat Islam tidak pernah tunggal dan monolitik melainkan melainkan plural apalagi pandangan tersebut berkaitan dengan masalah agama dan negara di Indonesia.

Kontestasi Ormas Islamis dalam percaturan politik di Indonesia tidak akan pernah surut. Agama di satu sisi seolah hanya mengatur kehidupan spritualitas manusia dengan Tuhanya tanpa sangkut pautnya dengan kehidupan sosial, politik dan bernegara di Indonesia sama halnya dengan ibarat jauh panggang dari pada api. Dinamika hubungan agama dan negara akan selalu mewarnai dalam percaturan politik Indonesia dimasa depan. Banyak hal yang bisa menjelaskan persoalan ini, mulai dari faktor sosiologis, historis, ideologis, dan politis.

Dinamika gerakan politik organisasi (Ormas) Islam di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Ormas Islam memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kontribusi Ormas Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti perjuangan kemerdekaan dalam pergerakan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka dan lain sebagainya.¹ Wajah Ormas Islam yang ada di Indonesia juga bervariasi mulai dari konservatif, moderat, dan bahkan radikal. Masing-masing bentuk tersebut memiliki visi, ideologi, karakter gerakan, tujuan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

¹Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), 250–255.

Agenda yang dikedepankan oleh gerakan Ormas Islamis di Indonesia hampir selalu menarik perhatian banyak kalangan. Alasannya sederhana selain Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga merupakan salah satu kekuatan politik yang menentukan dalam percaturan politik bangsa. Karena itu, kaitan antara Islam dan politik senantiasa memperlihatkan catatan penting khususnya dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Perdebatan tentang dasar negara menjelang dan pasca kemerdekaan republik ini merupakan catatan yang sulit dilepaskan dari perjalanan sejarah Islam politik di Indonesia. Ketika sejumlah pasal UUD 1945 diamandemen mengikuti era baru politik Indonesia, muncul pula ke permukaan isu sejarah lama yang menggaris bawahi cita-cita Islamisme yang pernah mengemuka hangat dalam majelis konstituante.²

Kontestasi Islamisme yang dimaksud dalam tulisan ini adalah gerakan yang menjadikan agama sebagai dasar perjuangan mereka. bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pelbagai aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara, seperti yang termaktub dalam *al-Islām huwa al-dīn wa al-dawlah* (Islam adalah agama dan sekaligus negara). Dengan demikian, Islam tidak perlu meniru konsep ketatanegaraan di luar Islam, apalagi dari Barat. Pendapat di atas juga didasarkan pada realitas sejarah Islam yang menunjukkan bahwa kehidupan Nabi Muhammad Saw. pada periode Madīnah (622-632), oleh banyak pakar dianggap sebagai kehidupan yang bernegara. Saat itu Nabi Muhammad Saw. tidak hanya bertindak sebagai Rasūl Allah, tetapi juga sebagai kepala negara. Pendukung paradigma ini adalah antara lain seperti Imām Khomeini, Hasan al-Bannā (1906-1949 M), Abū al-A'la al-Mawdudi (1903-1979 M),⁵¹ dan Sayyid Qutb (1905-1966). Dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, golongan ini tetap konsisten mempertahankan sistem kenegaraan masa klasik atau pertengahan, yakni sistem kekhalifahan universal, dengan menolak apa yang dinamakan nasionalisme dan modernisme yang menurut mereka cenderung pada proses sekularisasi dan westernisasi. Bagi

²Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 23–25.

mereka Islam adalah agama dan negara (*Islām huwa al-dīn wa al-daulah*) yang keduanya tidak dapat dipisahkan.³

Istilah Islam politik, ada yang menyamakannya dengan sebutan istilah islamisme, atau Islam politik, yaitu gerakan yang menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan mereka, dan memahami agama mengatur seluruh kehidupan masyarakat termasuk negara. Islam politik yang dimaksudkan adalah digunakan untuk menunjuk pada kegiatan atau organisasi-organisasi yang menggerakkan tanda dan simbol dari tradisi Islam. karena Islam sejak awal lahirnya sudah dianggap sebagai agama politik. Sebagian orang percaya bahwa pada dasarnya Islam politik tidak dapat memisahkan antara agama dan politik. Istilah ini juga dipakai untuk menunjuk pada aktivisme politik yang melibatkan kelompok-kelompok informal yang membentuk kembali *repertoire* dan bingkai-bingkai rujukan dari tradisi Islam.⁴

Keterbukaan politik dan bergesernya rezim otoritarian menuju rezim demokratis seakan menjadi karpet merah bagi menguatnya agregasi kontestasi Islam politik diranah publik. “Ruang publik” adalah ruang dimana setiap orang tanpa melihat agama, suku, ras maupun golongan dapat melakukan kontestasi secara bebas dan fair. Ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Dengan demikian, dalam konteks politis, ruang publik dapat dipahami sebagai ruang untuk warga negara, yakni individu bukan sebagai anggota ras, agama atau etnis, tetapi sebagai anggota politis atau rakyat (*demos*). Ruang publik bukanlah institusi atau organisasi, tetapi lebih, mengutip terminologi Habermas, sebagai jaringan yang amat kompleks untuk mengkomunikasikan gagasan, opini dan aspirasi. Setiap komunitas dimana di dalamnya dibahas norma-norma publik, secara otomatis akan menghasilkan ruang publik. Karena itu, dalam negara demokratis, banyak terdapat ruang publik. Dalam konteks ini, makna ruang publik bisa kabur, penuh kompetisi, bahkan anarkis, meskipun hal itu tidak berarti tanpa aturan. Dengan demikian, terma “publik” sendiri meniscayakan pemilahan tema-tema dan alasan-

³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 1–2.

⁴Quintan Quintan and (ed), *Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 37.

alasan rasional dalam masyarakat. Semenjak dihapuskan asas tunggal pancasila kontestasi islamisme ormas semakin menegaskan eksistensi mereka baik melalui mekanisme formal dengan mendirikan partai politik berbasis Islam, maupun kelompok gerakan non formal dengan mendirikan ormas-ormas Islam yang bersifat islamis.⁵

Jatuhnya Soeharto merupakan momentum dalam mendirikan perkumpulan bagi kelompok islamisme. Pada masa transisi politik tidak kurang dari 200 organisasi massa dan partai politik didirikan. Mereka mewakili berbagai kelompok dan golongan dari konservatif dan puritan, moderat, sampai ke liberal dan sekuler. Selain itu, organisasi massa berbasis aktivisme agama atau bertujuan lain secara sporadis juga jamak didirikan.⁶

Kontestasi islamisme pasca reformasi bergerak dalam bentuk mekanisme formal-legal dan melalui jalur extra informal-parlementer. Gerakan mereka berada di luar kerangka mainstream proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Kelompok-kelompok yang berkepentingan sebagai kontestan, dalam kontestasi ruang publik politik tersebut diantaranya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad⁷ dan Salafi merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif.⁸

⁵Badrus Syamsa Fata (ed), *Agama dan Kontestasi Ruang Publik* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), 5. Lihat juga Hebermas, *The Structure Transformation of The Public Sphere, an Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Polity Press, 1989), 33.

⁶Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 230.

⁷Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: LP3ES Jakrta & KITLV-Jakarta, 2008).

⁸Diantara gerakan Islam yang layak dikelompokkan Islam militan seperti *Al-Ikhwan al-Muslimun* di Mesir, *Kelompok Islam Bersenjata (GIA)* dan *FIS* di Al-Jazair, *Jema'at al-Islam* di Pakistan, *Front Pembebasan Palestina*, *Hizbut Tahrir* dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia juga ada gerakan keagamaan yang masuk kategori militan, yaitu *Front Pembela Islam (FPI)*, *Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)*, *Forum Komunikasi Ahlun Sunnah Waljamaah (FKAWJ)*, kemudian FKAWJ ini dibubarkan oleh panglimanya Ustadz Ja'far Umar Thalib. Pada masa Orla ada DI/TII pimpinan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. Begitu juga *Darul*

HTI merupakan salah satu Ormas transnasionalisme Islam yang baru saja dibubarkan oleh pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Meskipun undang-undang Ormas No 17 tahun 2013 sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2017 disahkan menjadi peraturan perundang-undangan, upaya pemerintah dalam membubarkan HTI menuai kontroversi. Di satu sisi dianggap sebagai tindakan yang harus didukung, karena menganggap Ormas HTI bertentangan dengan Pancasila. Sementara di sisi lain sikap politik pemerintah dalam membubarkan Ormas HTI melalui dikeluarkannya peraturan pemerintah No 2 Tahun 2017 sarat dengan tindakan kesewenang-wenangan merupakan bentuk otoritarian pemerintah, yang bisa saja mengancam Ormas-ormas yang lainnya di Indonesia.

Ormas Islam seperti, HTI, MMI, Laskar Jihad merupakan salah satu Ormas Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar perjuangannya. Ormas Islam tersebut dikenal sebagai Ormas yang paling solid, rapi, dan tidak hanya memiliki jaringan nasional melainkan juga internasional. HTI juga dikenal yang paling radikal, dalam arti, tidak hanya berjuang menegakkan syariat Islam tetapi lebih dari itu juga mendirikan khilafah Islam. Gerakan politik Hizbut Tahrir menjadikan Islam sebagai ideologi utama dalam menyebarkan gagasannya. Sehingga dalam menyebarkan gagasannya kerap kali menimbulkan gesekan, pertentangan antara agama di satu sisi dengan negara pada sisi lain. Isu yang sering mengemuka misalnya terkait isu umat versus bangsa, Islam versus negara, pemikiran Islam versus pemikiran sekuler gagasan seputar negara demokrasi vs negara Islam.⁹

Arqam, Abim, kelompok Republik Islam, PAS di Malaysia yang memiliki corak partai politik Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam ke dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang didukung kaum ulama' konservatif. Lihat Khamami Zada and Arif R. Arafah, Diskursus Politik Islam (Jakarta: LSIP, 2004), 123.

⁹Mohammad Iqbal Ahnaf, "Where Does Hizbut Tahrir Indonesia Go from Here," New Mandala, 2017.

Fenomena kontestasi Islamisme Ormas Islam mainstream di Indonesia adalah gerakan yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologi perjuangan mereka. Gerakan Islamisme Ormas Islam, perkembangannya dalam kontestasi Islam politik menimbulkan pertentangan, gesekan, ketegangan, konflik dengan Ormas-ormas lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada umumnya. Kontestasi islamisme semakin menguat seiring dengan mulai terbuka kran-kran demokrasi pada masa reformasi. Di era reformasi, yang ditandai dengan *euphoria* politik dan terbukanya kran-kran kebebasan berekspresi dimanfaatkan benar-benar oleh berbagai gerakan Islamisme.¹⁰

Islam merupakan salah satu kekuatan politik dalam percaturan politik Indonesia. Pancasila sebagai *raison d'êtrenya* adalah dasar negara yang bersifat final dalam konstitusi bangsa Indonesia. Di satu sisi, keanekaragaman, agama, adat, suku, etnis, dan bahasa merupakan kekayaan dan anugerah yang bisa disatukan di bawah naungan Pancasila yang didirikan oleh para *founding father* terdahulu. Namun di sisi lain, ada kecenderungan, kontestasi islamisme Ormas Islam mainstream tetap menyimpan niat terselubung untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam.¹¹

ISLAMISME DALAM PERPEKTIF GERAKAN ISLAM KONTEMPORER

Islamisme

Konsep lain yang menjelaskan fenomena Islam politik adalah Islamisme.¹² Oliver Roy menggunakan terma *Islamic* dan *neo-fundamentalisme* untuk menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat Islam. Roy menyebut gerakan Islam yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik dengan sebutan Islamisme. Sedangkan gerakan Islamisme yang telah mengalami pergeseran kearah pasivitas politik disebut dengan neo-fundamentalisme. Seperti

¹⁰Gordon P. Means, *Political Islam In Southeast Asia* (United State of America: Lunne Rienner Piblishes, 2009), 292–293.

¹¹Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2011), 402.

¹²Bassam Tibi, membedakan antara konsep Islam dan Islamisme. Islamisme, tidak hanya sekadar masalah politik. Lebih jauh, Islamisme berkaitan dengan politik yang diagamaisasikan (*religionized politics*). Lihat Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme* (Bandung: Mizan, 2016), 1.

Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama'ati Islami, dan *Islamic Salvation Fron* (FIS) sebagai representasi dari terma yang digunakan.

Sementara Asef Bayat, misalnya menggunakan istilah islamisme untuk merujuk pada wacana dan praktik-praktik di luar kelaziman (*extra-ordinary*), yang bertujuan, baik secara kolektif maupun individual, untuk mendorong perubahan atas sistem sosial dan politik yang ada. Sambil mengingatkan pentingnya menggaris bawahi aspek-aspek “aktivisme keagamaan” yang ada di dalamnya, ia mensejajarkan Islamisme dengan “religiositas aktif” (*active religiosity*), yang secara konseptual dibedakan dengan “kesalihan aktif” (*active pity*). Jika yang pertama memiliki nuansa-nuansa politik dan berorientasi ke luar (*outward oriented*) dengan tujuan melakukan perubahan, sementara yang kedua relatif terbebas dari politik dan umumnya berorientasi ke dalam diri pribadi (*inward oriented*).¹³ Penganjur dan pengikut Islam politik disebut islamis, artinya muslim yang berkomitmen terhadap aksi politik untuk menerapkan apa yang mereka anggap sebagai agenda Islam.¹⁴

Istilah Islamisme juga menunjukkan dua fenomena sekaligus, baik politik Islamis maupun re-Islamisasi, sebuah proses pada domain yang beraneka ragam dari kehidupan sosial yang diselubungi oleh tanda dan lambang yang diasosiasikan dengan tradisi budaya Islam. Proses ini meliputi pemakain jilbab, kebutuhan yang makin besar pada bacaan Islam dan komoditi agama lainnya, penampakan simbol-simbol identitas keagamaan, pembingkai kembali aktivitas ekonomi dengan terma-terma Islam.¹⁵ Belakangan ini re-islamisasi dimaknai secara lebih luas dari Islamisme dan kadang-kadang dibedakan dengan Islamisme. Sebab Islamisme tidak semata-mata ekspresi dari proyek politik, tetapi juga meliputi penggunaan kembali bingkai dengan referensi Islam di wilayah sosial dan kebudayaan.

Bassam Tibi mengelaborasi enam ciri utama dengan ideologi Islamisme. *Pertama*, interpretasi atas Islam sebagai *nizām islamī*. Dalam pandangan kaum Islamis, Islam adalah *dīn a dawlah*; *agama*

¹³Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori* (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012), 9.

¹⁴James Piscatori, *Islam, Islamist and the Electoral Principle in the Middle East* (Leiden: ISIM, 2002).

¹⁵Hans Abdiel Harmakaputra, “ISLAMISM AND POST-ISLAMISM ‘Non-Muslim’ in Socio-Political Discourses of Pakistan, the United States, and Indonesia,” *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (2015): 179–204.

bersatu dengan negara. Tibi menegaskan bahwa ide dasar yang menjadi pokok dan gagasan utama kelompok Islamis terletak pada keyakinannya tentang kesatuan agama dan negara ini. *Kedua*, Yahudi sebagai musuh utama yang akan menghancurkan umat Islam. Karena umat Yahudi memiliki cita-cita akan menciptakan “tatanan dunia Yahudi,” maka tujuan ini tentu saja akan bertabrakan dengan harapan ideal umat Islam. *Ketiga*, demokratisasi dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokratis. Di sini, Tibi menemukan banyak paradoks. Kaum Islamis pada dasarnya menghendaki mendirikan negara Islam, yang tentunya akan bertentangan dengan misi demokratisasi yang di dalamnya terkandung gagasan *civic pluralism*. Meski begitu, demokrasi harus membuka ruang bagi kelompok dengan pelbagai suara, termasuk mereka yang menyeru gagasan negara Islam. *Keempat*, evolusi jihad tradisional menuju jihadisme. Salah satu karakter dari kelompok Islamis adalah ideologi jihadisme yang merupakan reinterpretasi dari jihad. *Kelima*, syariatisasi negara. Kalangan Islamisme menafsirkan teks Alquran untuk mendukung ide politik yang telah direligionisasi. Untuk mengatasi ekspektasi kelompok Islamis ini, diperlukan fleksibilitas yang akan memperkaya hukum Islam itu sendiri. Ia menawarkan pembatasan syariat pada etika agama, sehingga syariat tidak betul-betul ditinggalkan. *Keenam*, kelompok Islamis sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas autentisitas. Klaim ini yang nanti akan menentukan posisi Islamis terhadap sekularisasi dan desekularisasi.¹⁶

Re-islamisasi sebagai pernyataan akan hasrat untuk mewujudkan kembali keteraturan moral berdasarkan keketatan. Keteraturan ini merupakan produk kontemporer yang berusaha mengatur hubungan sosial atas dasar pengawasan tingkah laku individu. Re-islamisasi merupakan pendahuluan dari islamisme dan menyajikan sebuah kata yang dipakai, baik oleh pendukung maupun lawan Islamisme. Pandangan islamisme dicirikan oleh beberapa hal berikut: 1) masyarakat hanya bisa diislamkan melalui kegiatan sosial dan politik. 2) gerakan islamis memiliki argumen politik bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh (islamisme menerima pandangan klasik bahwa Islam merupakan sistem lengkap

¹⁶Tibi, *Islam Dan Islamisme*, 35.

dan universal sehingga tidak perlu melakukan modernisasi atau pun penyesuaian diri.¹⁷

Kelompok Islamisme mencoba mengartikulasikan sebuah versi Islam yang dapat merespons defisit politik, ekonomi, dan budaya mereka. Kelompok Islamisme ini membayangkan Islam sebagai sebuah sitem ketuhanan yang lengkap dengan model politik, kode budaya, struktur hukum, dan tatanan ekonomi yang superior. Singkatnya, sebuah sistem yang merespons semua permasalahan manusia.¹⁸

Islam Politik

Islam politik merupakan gejala sosial politik di berbagai belahan dunia yang berkaitan dengan aktivitas sekelompok individu muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakini bersama. Dalam defenisi ini Islam politik dikonseptualisasikan terutama bukan sebagai gejala keagamaan, tetapi lebih merupakan fenomena sosial-politik yang melibatkan sekelompok individu muslim yang aktif melakukan gerakan yang didasari ideologi tertentu yang mereka yakini. Unsur terpenting yang membedakan Islam politik dengan gejala sosial-politik lain, terletak pada tiga hal 1) aktor yang terlibat, 2) aktivisme, 3) ideologi.¹⁹

Istilah ini digunakan untuk menunjukan pada kegiatan-kegiatan organisasi yang menggerakkan dan mengajak (mengagitasi) diwalayah politik, yang menggunakan tanda dan simbol-simbol dari tradisi Islam. Istilah ini juga dipakai untuk menunjukkan pada aktivisme politik yang melibatkan kelompok informal yang membentuk kembali *repertoire* dan bingkai-bingkai rujukan dari tradisi Islam, itulah yang disebut dengan *muslim politic*.²⁰

Sementara itu, Oliver Roy menyimpulkan bahwa gerakan Islamisme telah mengalami pergeseran dan kehilangan karakter revolusionernya, tidak lagi radikal dan telah menjadi sekedar pengelompokan semacam neo-fundamentalisme. Ada bukti bahwa

¹⁷M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transimisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Elangga, 2007), 20.

¹⁸Asef Bayat, *Post-Islamisme*, terj: Faiz Tajul Millah (Yogyakarta: LKIS, 2011), 12.

¹⁹Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori*, 3–5.

²⁰M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 10–15.

Islamisme telah bertransformasi menjadi proletarianisasi. Neo-fundamentalisme dalam arti aktivisme yang berpusat pada moralitas telah menjadi lazim dalam gerakan ini. Ini menandakan bahwa dikalangan Islamis berkembang pemikiran dan gerakan yang fokus pada penerapan syariat Islam dari pada upaya mewujudkan bentuk politik baru, model-model masyarakat baru, atau sebuah agenda untuk masa depan yang lebih cerah. Di Timur Tengah, kaum Islamis tidak pernah berusaha mewujudkan sebuah masyarakat baru dan apalagi landasan politik baru. Kegagalan kaum islamis berakar pada tendensi mereka untuk meyebar luaskan kebajikan dengan mewujudkan masyarakat yang baik.

Fazlur Rahman menggunakan tema revivalisme Islam (*Islamic Revivalisme*) untuk menunjuk fenomena munculnya gerakan keagamaan Islam kontemporer. Sebuah gerakan yang sesungguhnya tidak monolitik, tidak tunggal, dan bertingkat-tingkat. Menurutny keragaman, dan gradasi-gradasi aktivitas kebangkitan Islam ini tercermin dari kosa kata Arab yang digunakan untuk menggambarkan kebangkitan Islam, baik perorangan maupun kelompok. Mereka ada yang menyebut dirinya sebagai *Islāmiyah* atau *aṣhliyah* (orang Islam yang asli). *Mukminīn* atau *mutadayyinīn* (orang beriman yang shaleh). Mereka juga memakai kosa-kata yang berkonotasi ajaran dan gerakan, seperti *al-Bath al-Islāmī* (kebangkitan kembali Islam), *al-Ṣahwah al-Islāmī* (kebangkitan Islam), *Ihya al-Dīn* (menghidupkan agama), dan *Al-Uṣūliyah al-Islāmiyah* (Fundamentalisme Islam). Kosa kata ini dipakai dalam pengertian “usaha mencari keyakinan-keyakinan yang fundamental, dasar-dasar komunitas dan pemerintahan Islam dan dasar-dasar hukum syariat”.²¹

Kebangkitan Islam menggambarkan tingginya kesadaran umat Islam. Bentuk lain Islam yang merakyat ini ditunjukkan dengan menyebarnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan dan persaudaraan serta ketaatan yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya, kecenderungan ini ditandai pasivitas politik, kecuali ada dorongan dari pemerintah atau pihak musuh dari luar.

Akan tetapi, dalam kebangkitan Islam, terdapat serangkaian aktivisme keagamaan yang melibatkan kelompok-kelompok Islam militan. Kelompok militan ini memiliki kesadaran politik yang

²¹Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, 17–20.

sangat tinggi, berlawanan dengan negara dan unsur-unsur penguasa serta lembaga-lembaganya. Antara pendukung gerakan kebangkitan Islam yang lebih luas dengan kelompok militan ini terjadi hubungan simbiotik dimana kelompok militan akan mudah melakukan rekrutmen anggota-anggota baru dan mudah pula bersembunyi dibalik gerakan kebangkitan Islam ketika berkonfrontasi dengan penguasa. Oleh karena itu, tidak heran jika gerakan kebangkitan Islam dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan yang dinamis antara spritualisme pasif-apolitis dengan militansi dan radikalisme. Oleh karena itu, cakupan dan kebangkitan yang luas, istilah revivalisme, islamisme, dan fundamentalisme sering digunakan secara bergantian dalam literatur pemikiran politik.

Revivalisme Islam

Konsep revivalisme Islam merupakan suatu gambaran dari pengamat Islam tentang fenomena kebangkitan Islam kontemporer. Konsep ini relevan karena kemunculan gerakan dakwah kampus diasumsikan sebagai bagian dari gelombang kebangkitan Islam yang ditransmisikan dari Timur Tengah.

Revivalisme Islam, memiliki karakter keyakinan umum sebagai berikut: *Pertama*, Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap bahwa agama integral dengan politik, hukum dan masyarakat. *Kedua*, kegagalan masyarakat muslim disebabkan oleh penyimpangan dari jalan lurus Islam dan mengikuti Jalan sekuler Barat dengan ideologi dan nilai-nilai sekuler yang materialistis. *Ketiga*, pembaharuan masyarakat, mensyaratkan kembali pada Islam. *Keempat*, untuk memulihkan kekuasaan Tuhan harus menerapkan hukum-hukum Islam. *Kelima*, meski westernisasi ditolak, tidak demikian dengan modernisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi diterima tetapi harus tunduk pada nilai-nilai Islam. *Keenam*, proses islamisasi atau lebih tepatnya re-islamisasi memerlukan organisasi atau serikat muslim yang berdedikasi, terlatih dan mengajak orang lain untuk lebih taat dan melawan segala bentuk ketidakadilan sosial.²²

R. Hair Dekmejian menggunakan tema revivalisme Islam (*Islamic Revivalisme*) untuk menunjuk fenomena munculnya gerakan keagamaan Islam kontemporer. Sebuah gerakan yang sesungguhnya

²²Haedar Nashir, *Islam Syari'ah, Ideologi Islam Radikal di Indonesia* (Yogyakarta: PSAP, 2013), 185.

tidak monolitik, tidak tunggal, dan bertingkat-tingkat. Menurutnya, keragaman, dan gradasi-gradasi aktivitas kebangkitan Islam ini tercermin dari kosa kata Arab yang digunakan untuk menggambarkan kebangkitan Islam, baik perorangan maupun kelompok. Ada yang menyebut dirinya sebagai *Islāmiyah* atau *aşliyah* (orang Islam yang asli). *Mukminīn* atau *mutadayyinīn* (orang beriman yang shaleh). Mereka juga memakai kosa-kata yang berkonotasi ajaran dan gerakan, seperti *al-Bath al-Islāmī* (kebangkitan kembali Islam), *al-şahwah al-Islāmī* (kebangkitan Islam), *Ihyā' al-Dīn* (menghidupkan agama), dan *al-Uşūliyyah al-Islāmiyah* (Fundamentalisme Islam). Kosa kata ini dipakai dalam pengertian “usaha mencari keyakinan-keyakinan yang fundamental, dasar-dasar komunitas dan pemerintahan Islam dan dasar-dasar hukum syari’at.”²³

KONTESTASI ISLAMISME DI INDONESIA

Pasca kegagalan Islam politik di parlemen tak membuat kelompok islamisme Ormas Islam mainstream surut. Mereka semakin solid dan kreatif memodifikasi perjuangan menjadikan Piagam Jakarta dan syariat Islam sebagai dasar bernegara. Perjuangan melalui organisasi politik non-parlemen pun ditempuh. Sebab di era reformasi inilah umat Islam menambatkan harapan dan peluang baru penerapan syariat Islam dan Khilafah. Momentum reformasi ternyata memantik semangat perjuangan organisasi politik Islam seperti HTI, MMI, FPI, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memperkuat barisan kekuasaan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Namun, dari beberapa organisasi politik Islam ideologis di atas, HTI dan MMI dianggap sebagai organisasi Islam ideologis yang cukup fenomenal dan kontroversial dalam ranah politik Islam di Indonesia saat ini. Sebab, kedua organisasi ini paling getol dalam memperjuangkan penegakan syariat Islam dengan strategi memobilisasi sumber daya yang solid dan militan di setiap arena kekuasaan demi mencapai kekuasaan simbolik dan substantif (politik). Selain itu, kedua organisasi ini juga tersebar ke seluruh nusantara.

Dengan kata lain, dasar atau fondasi yang digunakan oleh kelompok Islamis untuk membangun “Islamisme” atau “ideologi Islam politik” ini bukanlah hukum Islam atau Syariat Islam itu sendiri,

²³Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 3.

melainkan sebuah pemahaman kembali, tafsir ulang atau rekonstruksi atas sejumlah diktum dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan politik dimana kaum Islamis itu berada. Itulah sebabnya kenapa visi, platform, agenda dan tujuan berbagai kelompok Islamis di berbagai negara itu berlainan antara satu dan lainnya. Meskipun berlainan, kaum Islamis ini memiliki ciri-ciri umum, yaitu mempropagandakan sekaligus memaksakan (pemahaman) keislaman versi mereka agar dipraktekkan di pemerintahan maupun masyarakat. Sebagian lagi gigih ingin mengganti sistem politik-pemerintahan yang ada dengan sistem politik-pemerintahan (ideal) yang mereka imajinasikan, baik dalam bentuk khilafah atau Negara Islam dan lainnya. Beberapa kelompok tersebut antara lain Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Penyelenggaraan Penegakan Syariat Islam serta beberapa kelompok lain di beberapa Jawa, seperti pengikut NII/DII di Jawa Barat.²⁴

Kontestasi Islam politik pasca reformasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme: 1) memanfaatkan peluang politik, 2) memobilisasi struktur, dan 3) melakukan framing proses gerakan.

MEMANFAATKAN PELUANG POLITIK

Dalam memanfaatkan peluang politik, tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik yang ada di Indonesia. Menurut Samuel P. Huntington, akan selalu ada sebuah kegembiraan dan semangat yang besar jika ada sebuah rezim yang telah berkuasa dengan otoriter runtuh.²⁵ Begitu juga ketika Orde Baru ambruk yang ditandai dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan kemudian memasuki masa transisi. Kegembiraan dan semangat yang besar ini didasari oleh impian akan lahirnya sebuah tatanan baru menggantikan tatanan lama yang memang rusak.

Proses terjadinya peluang atau kesempatan politik ini diawali dengan: *pertama*, adanya legitimasi terhadap negara yang berkurang sehingga rakyat mampu menyusun gerakan dan juga identitas kolektif. *Kedua*, terdapat erosi dalam tubuh kekuasaan negara itu sendiri sehingga membuat rakyat semakin tidak percaya dan kemudian memunculkan gerakan moral menentang kekuasaan

²⁴Nashir, *Islam Syari'ah, Ideologi Islam Radikal di Indonesia*, 281.

²⁵Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj: Asril Marjohan (Jakarta: Pustaka Utama Gravitasi, 2001), 211.

lewat aksi protes dan demonstrasi. Dan *ketiga*, dari kondisi pertama dan kedua di atas, akan muncul berbagai mobilisasi gerakan sosial yang ikut mendorong dan memperkuat proses ke arah transisi atau perubahan yang diinginkan.

Ketiga hal inilah yang dialami oleh Orde Baru. Dengan adanya mobilisasi gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, Soeharto sebagai ikon Orde Baru meletakkan jabatannya sebagai presiden, dan ini kemudian menjadi pertanda bahwa rezim Orde Baru telah hancur. Kondisi inilah yang bisa disebut sebagai peluang politik yang sangat vital dan *urgen* untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, tidak terkecuali kelompok Islam politik. Kelompok Islam politik bergerak dan membangun organisasi yang sanggup memobilisasi massa untuk melakukan perubahan secara sistemik.

Setelah sekian lama terkungkung dan berlutut dalam gerakan bawah tanah, gerakan Islamisme ormas Islam muncul mengemuka menjadi sebuah organisasi gerakan yang mempunyai *platform* atau ideologi yang sangat jelas dan gamblang serta diikspresikan secara luas, yakni menegakkan syariat Islam dan membangun khilafah islamiyah. Namun yang pasti, tahap peluang politik ini merupakan tahap penjajakan untuk membentuk sebuah organisasi yang mapan dan mampu menancapkan eksistensinya secara lebih kokoh dan terorganisir. Dan biasanya, tahap peluang politik ini selalu disertai dengan berbagai protes dan demonstrasi menentang segala hal yang menurut anggapan kelompok Islam politik bertentangan dengan ajaran Islam. Memanfaatkan peluang politik yang ada untuk memberi tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintahan dan sistem yang ada.²⁶

Dalam melakukan aktivitas protes atau demonstrasi harus melihat unsur-unsur struktural. Jika unsur strukturalnya sangat kuat, maka aktivitas protes atau demonstrasi sebaiknya tidak dilakukan; begitu juga sebaliknya, jika lemah, maka itulah peluang politik yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang dilakukan gerakan islamisme selama keberadaannya di Indonesia. Selama kekuasaan rezim Orde Baru yang sangat kuat, islamisme ormas Islam mainstream melakukan gerakan bawah tanah dengan berusaha mengonsolidasikan kekuatan secara internal dan penguatan

²⁶Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori*, 3-5. Hasan,

basis massa agar menjadi kader yang militan dan penuh dedikasi. Namun setelah rezim Orde Baru tumbang, gerakan islamisme bergerak dan mengorganisasikan diri dan kekuatannya secara nyata melalui serangkaian gerakan sosial serta aksi protes namun simpatik yang terus terjalin mengikuti kondisi dan situasi yang ada. Juga bergerak untuk mensosialisasikan segala bentuk program dan visi-misi organisasi dan bertanggung jawab secara terbuka kepada publik.

Kontestasi Islamisme memanfaatkan reformasi sebagai peluang politik (*political opportunity*) dan sebuah kesempatan emas untuk menyuarakan ide-idenya tentang wajib dan pentingnya menegakkan syariat Islam dan khilafah bagi umat Islam secara massif dan terbuka. Berkat berkah reformasi, gerakan Islamisme ormas Islam mainstream tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Mereka berkembang dengan pesat di Indonesia. Dengan adanya kebebasan berekspresi dan beraktivitas politik –berserikat dan berkumpul- di era reformasi, mereka leluasa dalam menjalankan aktivitasnya untuk berdakwah mewujudkan tegaknya syariat Islam dan khilafah, dan juga melakukan rekrutmen anggota secara terbuka.

MEMOBILISASI STRUKTUR

Mobilisasi struktur yang dilakukan Ormas HTI, dalam rangka memobilisasi gerakannya. *Pertama*, langkah pembinaan dan pengkaderan (*marḥlah tathqīf*); *kedua*, langkah interaksi dengan umat (*marḥlah tafā'ul ma'a al-ummah*). Yang masuk dalam konteks mobilisasi struktur ini adalah pembinaan dan pengkaderan dan interaksi dengan umat.²⁷

Gerakan Islamisme di Indonesia berkembang dengan pesat, dimulai pada tahap pembinaan dan pengkaderan. Pada tahap awal ini, kontestasi islamisme dipusatkan pada upaya membangun dan memantapkan kerangka organisasi, memperbanyak pendukung dan pengikut, sekaligus mengkader dan membina para pengikutnya dalam halaqah-halaqah dengan pemikiran Islam. Tahap pembinaan dan pengkaderan, bisa dikatakan bahwa pada era Orde Baru, perjuangan Islamisme baru sampai pada tahap *tathqīf* (pembinaan dan pengkaderan). Pada pasca reformasi, Islamisme memfokuskan

²⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Terj: Oleh Abdullah, Cet. Ke. 6 (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), 6.

aktivitasnya untuk membesarkan tubuh organisasi (penguatan basis massa) dan menyebarkan ide secara terbuka.

Dengan demikian, sesuai dengan kerangka teoritik, maka pada tahap inilah yang dinamakan dengan proses mobilisasi struktur (*mobilizing structure*), yakni tahap bahwa suatu gerakan akan mencapai keberhasilan secara efektif jika gerakan tersebut mempunyai sebuah organisasi pergerakan. Jadi, mobilisasi struktur merupakan kendaraan kolektif (organisasi pergerakan), baik formal maupun informal, yang dengan organisasi tersebut para anggota mampu memobilisasi dan melakukan aksi kolektif.

PENYUSUNAN PROSES GERAKAN

Framing merupakan proses framing merupakan identifikasi terhadap masalah-masalah sosial yang dialami kemudian diformulasikan untuk menjadi sebuah konsep untuk melakukan gerakan sosial.²⁸ Dalam menyusun proses gerakan ini, kontestasi Islamisme ormas Islam melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan segala cita-cita dan perjuangan organisasi, yakni tegaknya syariat Islam dan bahkan tegaknya khilafah islamiyah. Dalam konteks ini, ada dua hal yang sangat penting untuk dikedepankan, yakni melakukan pergolakan pemikiran (*al-shirā' al-fikr* dan juga perjuangan politik (*al-kifah al-siyāsī*). Pergolakan pemikiran dilakukan dengan cara menentang berbagai keyakinan, ideologi, aturan, dan pemikiran yang rusak; menolak segala akidah yang batil serta pemikiran yang salah dan sesat dengan mengungkap kesesatan dan pertentangannya dengan Islam; dan membersihkan umat dari segala pengaruh pemikiran dan sistem kufur.

Pergolakan pemikiran dilakukan Islamisme melalui berbagai sarana seperti media cetak dan elektronik. Media cetak yang dijadikan sarana meliputi penerbitan berbagai buku, majalah, buletin al-Islam yang terbit mingguan, dan berbagai *leaflet* yang disebarkan kepada masyarakat. Kelompok Islamisme juga memanfaatkan media elektronik, yaitu internet dengan membuat berbagai website.

Sistem politik yang digunakan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Inti sistem demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengajarkan bahwa

²⁸Oman Sukamana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing Malang, 2006), 5.

kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, hak tertinggi untuk melahirkan hukum ada di tangan rakyat. Inilah paham yang paling bertentangan secara diametral dengan Islamisme dan sekaligus menjadi sumber malapetaka, karena jika manusia diberi kesempatan untuk membuat hukum, maka hukum yang dibuat akan senantiasa dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri, kelompoknya, dipengaruhi oleh lingkungan, dibatasi oleh tempat, terikat oleh waktu, zaman, dan seterusnya. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan pasti akan menimbulkan perselisihan, pertentangan, kezaliman, dan ketidakadilan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran pada umat manusia. Kelompok islamisme juga melakukan kontestasi dengan menguasai mesjid, kampus, anak muda, mahasiswa, komunitas takmir, birokrasi dan pemerintahan, rumah sakit, sekolah Islam terpadu dan sebagainya.

PENUTUP

Fenomena kontestasi islamisme Ormas Islam mainstream merupakan sebuah fenomena logis dalam konstelasi politik di tanah air. Kontestasi Islam politik pasca reformasi sampai saat ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap rezim-rezim sebelumnya. Dalam konteks kontestasi islamisme, Ormas Islam mainstream merasa terpanggil dan berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan kekuasaan Islam dengan memformulasikan arah perjuangannya lewat jalur organisasi politik Islam ideologis dengan mengusung penerapan syariat Islam.

Kontestasi Islamisme yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang politik (*political opportunities*), memobilisasi struktur (*mobilizing structures*), dan melakukan penyusunan proses gerakan (*framing process*). Hasil fenomena kontestasi Islam politik pasca reformasi, yakni: *pertama*, memanfaatkan peluang politik, yaitu peluang reformasi untuk mengakhiri gerakan bawah tanah menjadi gerakan legal sehingga dapat bergerak dengan leluasa. *Kedua*, memobilisasi struktur, yang terdiri dari mobilisasi internal dengan melakukan pengkaderan secara intensif dan mobilisasi eksternal dengan menyuarakan penegakan syariat Islam dan khilafah. *Ketiga*, framing proses gerakan, yakni dengan cara melakukan pergolakan pemikiran dengan menentang segala pemikiran dan sistem dari Barat, seperti demokrasi, nasionalisme dan HAM. Ketiga kerangka

strategis itulah yang menjadi bagian dari gerakan Islam politik dalam menegakkan syariat Islam. Dan melakukan perembesan dengan menguasai masjid, kampus, mahasiswa, komunitas takmir, birokrasi dan pemerintahan dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahnaf, Mohammad Iqbal. "Where Does Hizbut Tahrir Indonesia Go from Here." New Mandala, 2017.
- Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam dan Utopia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Bayat, Asef. *Post-Islamisme*, Terj:Faiz Tajul Millah. Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2011.
- Fata (ed), Badrus Syamsa. *Agama dan Kontestasi Ruang Publik*. Jakarta: The Wahid Institute, 2012.
- Harmakaputra, Hans Abdiel. "ISLAMISM AND POST-ISLAMISM 'Non-Muslim' in Socio-Political Discourses of Pakistan, the United States, and Indonesia." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (2015).
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan Teori*. Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012.
- . *Laskar Jihad, Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES Jakarta & KITLV-Jakarta, 2008.
- Hebermas. *The Structure Transformation of The Public Sphere, an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Polity Press, 1989.
- Hunter, Shireen T. *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terj: Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 2001.

- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Bandung: Mizan, 2005.
- Maarif, Syafi'i. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Means, Gordon P. *Political Islam In Southeast Asia*. United State of America: Lunne Rienner Piblishes, 2009.
- Nabhani, Taqiyuddin an-. *Mafahim Hizbut Tahrir*, Terj: Oleh Abdullah, Cet. Ke. 6. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.
- Nashir, Haedar. *Islam Syari'ah, Ideologi Islam Radikal di Indonesia*. Yogyakarta: PSAP, 2013.
- Piscatori, James. *Islam, Islamist and the Electoral Principle in the Middle East*. Leiden: ISIM, 2002.
- Quintan, Quintan, and (ed). *Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012.
- Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal, Transimisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Elangga, 2007.
- . *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Sukamana, Oman. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing Malang, 2006.
- Tibi, Bassam. *Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan, 2016.
- Zada, Khamami, and Arif R. Arafah. *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP, 2004.